

Budaya Politik Lokal Dalam Pelaksanaan Pemilu Di Nagori Urung Panei Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun

Tri Mei Rosalya Purba

Universitas Negeri Medan

Email: trimeipurba@gmail.com

Julia Ivanna

Universitas Negeri Medan

Email: juliaivanna@unimed.ac.id

Jln William Iskandar Medan

Korespondensi penulis: trimeipurba@gmail.com

Abstract: *General elections are a means for the people to show that they have sovereignty. This concept implies that the people are the highest power holders in the country and they themselves determine the form and way the government is run. The implementation of regional head elections also reflects this understanding. In general, general elections aim to ensure that the transfer of government power occurs peacefully, regularly, and in accordance with the mechanisms guaranteed and regulated by the constitution. Political culture is a system of values and beliefs held by a society. However, each element of society has a different political culture, for example between society and its elites. It is necessary to develop a political-cultural character where "political" activities are no longer the arena of the ruling elite, but as a means of fulfilling the basic needs of the people in producing mutual benefits (public goods). The method used is library research, collecting data by searching for sources and constructing them from various sources such as books, journals and existing research. The result is that qualitative research is carried out with a research design where the findings are not obtained through statistical procedures or in the form of calculations, but rather aims to reveal phenomena holistically-contextually by collecting data from natural settings and using researchers as key instruments. To understand political culture, you must first understand the meaning of culture and politics.*

Keywords: *General Election, Culture, Politics.*

Abstrak: Pemilihan umum menjadi sarana bagi rakyat untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki kedaulatan. Konsep ini mengimplikasikan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi di negara dan mereka sendiri yang menentukan bentuk dan cara pemerintahan dijalankan. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah juga mencerminkan paham ini. Secara umum, pemilihan umum bertujuan memastikan bahwa peralihan kekuasaan pemerintahan terjadi secara damai, teratur, dan sesuai dengan mekanisme yang dijamin dan diatur oleh konstitusi. Budaya politik adalah sistem nilai dan kepercayaan yang dianut oleh suatu masyarakat. Namun setiap elemen masyarakat mempunyai budaya politik yang berbeda-beda, misalnya antara masyarakat dengan para elitnya. Perlu dibangun karakter politik-budaya di mana aktivitas "politik" tidak lagi menjadi arena elite penguasa, namun sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dalam menghasilkan keuntungan bersama (barang publik). Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research), pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Hasilnya bahwa penelitian kualitatif dilakukan dengan desain penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau dalam bentuk hitungan, melainkan bertujuan mengungkapkan fenomena secara holistik-kontekstual dengan pengumpulan data dari latar/ setting alamiah dan memanfaatkan peneliti sebagai instrument kunci. Untuk memahami tentang budaya politik, terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertian budaya dan politik.

Kata kunci: Pemilihan Umum, Budaya, Politik.

LATAR BELAKANG

Di dalam negara yang demokratis Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu kegiatan politik yang menjadi syarat bagi kehidupan suatu negara. Di Indonesia, penyelenggaraan pemilu memang secara periodik sudah berlangsung sejak awal

Received September 30, 2023; Revised Oktober 30, 2023; Accepted November 23, 2023

* Tri Mei Rosalya Purba, trimeipurba@gmail.com

kemerdekaan bangsa ini, namun format demokrasi yang ideal baru nampak pada penyelenggaraan pemilu 2004 lalu yang terdiri dari pemilu legislatif dan pemilu presiden, yang berjalan relatif cukup lancar dan aman lancar dan aman.

Untuk menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran berdemokrasi, setiap warga negara dituntut untuk aktif terlibat, mereka tidak hanya menerima dan memenuhi tuntutan orang lain tetapi dapat ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, sehingga sistem pemerintahan yang demokrasi dapat diwujudkan dengan sesungguhnya.

Pemilihan umum menjadi sarana bagi rakyat untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki kedaulatan. Konsep ini mengimplikasikan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi di negara dan mereka sendiri yang menentukan bentuk dan cara pemerintahan dijalankan. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah juga mencerminkan paham ini. Secara umum, pemilihan umum bertujuan untuk memastikan bahwa peralihan kekuasaan pemerintahan terjadi secara damai, teratur, dan sesuai dengan mekanisme yang dijamin dan diatur oleh konstitusi. Sistem pemerintahan di Indonesia melibatkan peran penting pemerintahan daerah, dimana struktur pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota diisi oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dipilih melalui pemilihan umum kepala daerah. Namun, belakangan ini terjadi banyak diskusi dan perdebatan terkait pemilihan kepala daerah yang memunculkan polemik dan permasalahan, terutama setelah disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Sejak era kemerdekaan hingga reformasi saat ini, mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan. Pada awalnya, rakyat memilih langsung kepala daerah, tetapi kemudian beralih ke sistem pemilihan tidak langsung melalui DPRD. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, masyarakat menjadi kontra karena mekanisme pemilihan tidak langsung dinilai tidak sesuai dengan Pancasila dan konstitusi. Sebagai tanggapan, pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 untuk membatalkan undang-undang tersebut dan mengembalikan mekanisme pemilihan langsung yang dipilih oleh rakyat. Otomatis, mekanisme pemilihan yang diberlakukan secara tidak langsung berganti kembali dengan menggunakan sistem pemilihan secara langsung yang dipilih oleh rakyat

Berdasarkan hal tersebut, dalam negara demokrasi, rakyat berhak berpartisipasi dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin dan menentukan kebijakan umum di negaranya. Seperti halnya di Indonesia bentuk partisipasi rakyat terlihat dalam pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Di Indonesia, bentuk pemerintahan demokrasi telah dicita-citakan sejak awal. Sebagai bukti yuridisnya, UUD sebelum

amandemen dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.⁴ Sementara itu, sesudah amandem bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 masih menyiratkan hal yang serupa, yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan demikian, dalam suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Jadi demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat yang berkuasa dan memerintah.

Keadaan politik di desa Nagori urung paneii masih jauh seperti yang diharapkan. Banyak masyarakat enggan sebagai pemilih dalam pemilu lebih disebabkan pada ketidakpercayaan mereka pada rezim pemerintahan yang berkuasa. Kekecewaan mereka cenderung pada proses politik yang berlangsung karena cenderung tidak membawa dampak yang signifikan yang langsung dirasakan masyarakat dan jikapun ada membutuhkan waktu yang sangat lama. Pada akhirnya, sebagian masyarakat menjadi enggan memberikan suaranya pada Pemilu, dan pada akhirnya kecenderungan ini membawa efek kepada sistem politik yang dilaksanakan.

Berdasarkan hal tersebut, maka menurut penulis permasalahan ini untuk diteliti dan dianalisa dengan judul: "Budaya politik lokal dalam pelaksanaan pemilu di Nagori urung panei kecamatan Simalungun.

KAJIAN TEORITIS

Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno, dalam buku *Politeia* atau *Politics*, mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon* atau manusia yang pada dasarnya selalu bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Manusia saling ketergantungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Pada dasarnya anggota masyarakat saling terkait sebagai satu kesatuan sosial melalui perasaan solidaritas yang dikarenakan latar belakang sejarah, politik dan kebudayaan.

Masyarakat politik adalah masyarakat yang sadar politik atau masyarakat yang keikutsetaan hidup bernegara menjadi penting dalam kehidupannya sebagai warga negara. Masyarakat politik yang terdiri dari elite politik dan massa politik menjadi peserta rutin dalam kompetisi politik harus dibangun sebagai komponen masyarakat yang mempunyai etika politik dalam demokrasi. Ciri-ciri masyarakat politik antara lain sebagai berikut.

- a. Dengan sadar dan sukarela menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, terutama hak pilih aktif.
- b. Bersifat kritis terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan sikap:
 1. Menerima sebagaimana adanya,

2. Menolak dengan alasan tertentu, atau
 3. Ada yang suka diam tanpa memberikan reaksi apa-apa.
- c. Memiliki komitmen kuat terhadap partai politik yang menjadi pilihannya.
 - d. Dalam penyelesaian suatu masalah lebih suka dengan cara dialog atau musyawarah.

Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, budaya politik dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

- a. Budaya politik parokial (*parochial political culture*), yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan parokial apabila frekuensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut. Tipe budaya politik ini umumnya terdapat pada masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman di Indonesia. Dalam masyarakat ini tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Kepala suku, kepala kampung, kiai, atau dukun, yang biasanya merangkum semua peran yang ada, baik peran yang bersifat politis, ekonomis, maupun religius.
- b. Budaya politik kaula (*subyek political culture*), yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju, baik sosial maupun ekonominya, tetapi masih bersifat pasif. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan subjek jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek out put atau terdapat pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Namun, frekuensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan. Para subjek menyadari akan otoritas pemerintah dan secara efektif mereka diarahkan pada otoritas tersebut. Sikap masyarakat terhadap sistem politik yang ada ditunjukkan melalui rasa bangga atau malah rasa tidak suka. Intinya, dalam kebudayaan politik subjek sudah ada pengetahuan yang memadai tentang sistem politik secara umum serta proses penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
- c. Budaya politik partisipan (*participant political culture*), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Dan, juga merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang

berlangsung. Masyarakat cenderung diarahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak.

- d. Dalam kehidupan masyarakat, tidak menutup kemungkinan bahwa terbentuknya budaya politik merupakan gabungan dari ketiga klasifikasi tersebut di atas. Tentang klasifikasi budaya politik di dalam masyarakat, lebih lanjut adalah sebagai berikut.

Budaya politik partisipan merupakan kondisi ideal bagi masyarakat secara politik dalam berdemokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya harmonisasi hubungan warga negara dengan pemerintah, yang ditunjukkan oleh tingkat kompetensi politik, masyarakat merasa perlu untuk terlibat dalam proses pemilu dan memercayai perlunya keterlibatan dalam politik. Selain itu, warga negara berperan sebagai individu yang aktif dalam masyarakat secara sukarela, karena adanya saling percaya (trust) antar warga negara dan memiliki kebanggaan terhadap sistem politik dan memiliki kemauan untuk mendiskusikan hal tersebut. Masyarakat memiliki keyakinan dapat memengaruhi pengambilan kebijakan publik dalam beberapa tingkatan dan memiliki kemauan untuk menyampaikan kritik, mengorganisasikan diri dalam protes sebagai kontrol bila terdapat praktik-praktik pemerintahan yang tidak memihak rakyat

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research), pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Hasilnya bahwa penelitian kualitatif dilakukan dengan desain penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau dalam bentuk hitungan, melainkan bertujuan mengungkap fenomena secara holistik-kontekstual dengan pengumpulan data dari latar/ setting alamiah dan memanfaatkan peneliti sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif, sehingga proses dan makna berdasarkan perspektif subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Budaya Politik

Untuk memahami tentang budaya politik, terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertian budaya dan politik. Budaya berasal dari bahasa Sansekerta yaitu budhayah, bentuk jamak dari budhi yang artinya akal, Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan akal atau budi. Kebudayaan adalah segala yang dihasilkan oleh manusia berdasarkan

kemampuan akal nya. Ciri-ciri umum dari kebudayaan adalah dipelajari, diwariskan, dan diteruskan, hidup dalam masyarakat, dikembangkan dan berubah, serta terintegrasi.

Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suasana zaman saat itu dan tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Artinya, budaya politik yang berkembang dalam suatu negara dilatarbelakangi oleh situasi, kondisi, dan pendidikan dari masyarakat itu sendiri, terutama pelaku politik yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membuat kebijakan, sehingga budaya politik yang berkembang dalam masyarakat suatu negara akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Secara teoretik, budaya politik juga dapat diartikan aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, takhayul, dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat dalam memberikan rasionalisasi untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.

Perbedaan budaya politik dalam masyarakat secara garis besar dapat dibedakan dalam tiga budaya politik, yaitu budaya politik apatis (acuh, masa bodoh, pasif), budaya politik mobilisasi (didorong atau sengaja dimobilisasi), dan budaya politik partisipatif (aktif). Perbedaan budaya politik yang berkembang dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya:

- a. Tingkat pendidikan masyarakat sebagai kunci utama perkembangan budaya politik masyarakat.
- b. Tingkat ekonomi masyarakat; semakin tinggi tingkat ekonomi/sejahtera masyarakat, maka partisipasi masyarakat pun semakin besar.
- c. Reformasi politik/political will (semangat merevisi dan mengadopsi sistem politik yang lebih baik).
- d. Supremasi hukum (adanya penegakan hukum yang adil, independen, dan bebas).
- e. Media komunikasi yang independen (berfungsi sebagai kontrol sosial, bebas, dan mandiri).

Konsep budaya politik mencakup banyak aspek dalam fenomena politik, tradisi politik dan cerita kepahlawanan rakyat, semangat institusi publik, politik kewargaan, tujuan yang diartikulasikan sebuah ideologi politik, aturan main politik formal ataupun non-formal, stereotip, gaya, moda, dan langgam pertukaran politik, dan sebagainya. Namun demikian, konsep ini biasanya diringkas sebagai pola distribusi orientasi terhadap politik yang dimiliki oleh para anggota komunitas politik. Analisis budaya politik terutama bermanfaat ketika hendak mengetahui sejauhmana budaya memainkan perannya dalam membentuk perilaku kolektif sebuah komunitas politik, apakah perilaku kolektif tersebut produktif dalam konteks

pengembangan masyarakat secara umum, dan bagaimana budaya politik sebuah masyarakat mengalami transformasi menuju masyarakat yang lebih terbuka, adil dan sejahtera.

2. Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi politik masyarakat sangat membantu berkembangnya budaya politik dalam suatu negara. Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik, hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya. Sebab, kalau ini yang terjadi, maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Dapat juga diartikan merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi:

- a. Kegiatan pemilihan, yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha memengaruhi hasil pemilu.
- b. Lobby, yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud memengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu.
- c. Kegiatan organisasi, yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.
- d. Contacting, yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna memengaruhi keputusan mereka.
- e. Tindakan kekerasan (violence), yaitu tindakan individu atau kelompok guna memengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembunuhan politik (assassination), revolusi dan pemberontakan.

Kelima bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson telah menjadi bentuk klasik dalam studi partisipasi politik. Keduanya tidak membedakan apakah tindakan individu atau kelompok di tiap bentuk partisipasi politik legal atau ilegal. Klasifikasi bentuk partisipasi politik Huntington dan Nelson belumlah relatif lengkap karena keduanya belum memasukkan bentuk-bentuk partisipasi politik seperti kegiatan diskusi politik, menikmati berita politik, atau lainnya yang berlangsung di dalam skala subjektif individu. Misalnya, menyebutkan: (a) opini publik, bahwa opini publik yang kuat dapat saja mendorong para legislator ataupun eksekutif politik mengubah pandangan mereka atas suatu isu; (b) polling adalah upaya pengukuran opini publik dan juga memengaruhinya. Melalui polling inilah partisipasi politik warganegara menemui manifestasinya. Di dalam polling terdapat aneka konsep yang menjadi bagian di dalam dirinya, yaitu straw polls, random sampling, stratified sampling, exit polling, dan tracking polls.

Di Indonesia saat ini penggunaan kata partisipasi politik lebih sering mengacu pada dukungan yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat oleh para pemimpin politik dan pemerintahan. Misalnya, ungkapan pemimpin, “Saya mengharapkan partisipasi masyarakat untuk menghemat BBM dengan membatasi penggunaan listrik di rumah masing masing.” Sebaliknya, jarang kita mendengar ungkapan yang menempatkan warga sebagai aktor utama pembuatan keputusan.

Demokrasi hanya merupakan media, yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kalau demokrasi ditegakkan, dengan tingginya partisipasi rakyat dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya, maka masyarakat adil dan makmur bisa terwujud. Paling tidak ada tiga syarat minimum yang harus dimiliki oleh sebuah rezim yang mengaku demokratis. Pertama, adanya keterwakilan rakyat secara nyata dalam berbagai proses pengambilan keputusan ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Selama ini, sistem keterwakilan direduksi menjadi persoalan hak rakyat dalam menggunkan hak pilihnya untuk memilih wakil rakyat melalui pemilu, di mana kemampuan calon-calon wakil rakyat masih jauh dari standar yang diinginkan oleh rakyat, sehingga setelah pemilu usai, dengan mengatasnamakan rakyat, wakil rakyat itu (DPR) bertindak di luar kontrol rakyat. Kedua, adanya komitmen yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Di sini demokrasi harus menjamin pemenuhan hak-hak dasar rakyat, seperti pendidikan, penyediaan lapangan kerja, jaminan penghidupan layak, kesehatan, perumahan, dll. Ketiga, adanya ruang bagi partisipasi rakyat atau menjadikan rakyat sebagai subjek demokrasi.

KESIMPULAN

Budaya politik adalah sistem nilai dan kepercayaan yang dianut oleh suatu masyarakat. Namun setiap elemen masyarakat mempunyai budaya politik yang berbeda-beda, misalnya antara masyarakat dengan para elitnya. Perlu dibangun karakter politik-budaya di mana aktivitas “politik” tidak lagi menjadi arena elite penguasa, namun sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dalam menghasilkan keuntungan bersama (barang publik). Masyarakat dalam struktur negara modern dicirikan oleh para pelayan yang harus memenuhi segala kebutuhan penguasa, bukan birokrat dan penguasa yang merupakan raja yang harus mengabdikan dan sebaliknya, seperti dalam struktur hierarki sistem politik kuno. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan anggota DPR harus diimbangi dalam bentuk pelayanan prima yang memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dan sebagai imbalannya terakumulasi kekayaan, kekuasaan dan kesejahteraan untuk dinikmati masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih terhadap Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada dosen pengampu mata kuliah politik lokal dan otonomi daerah yaitu ibu Julia Ivanna yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk mengerjakan artikel ini dan tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tua yang telah mendukung dengan doa baik dalam hal materi maupun nasihat dan semangat serta terimakasih juga kepada pihak yang terlibat penyelesaian artikel ini

DAFTAR REFERENSI

- Ali Marwan Hsb, “Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013 (The Democratic of Regional Election Based on Constitutional Court Decisions Number 97/PUU-IX/2013)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13 no. 3, (2016).
- Almond, Gabriel. A dan Sidney Verb. 1990. *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara* (terjemahan Sahat Simamora). Jakarta: Bumi Aksara.
- Andi Yakub, Ahmad Bashawir Haji Abdul Ghani, Mohammad Syafii Anwar. 2018. *Bugis Ethnic Perception Towards Urgency Of Political Decentralization And District Autonomy In South Sulawesi, Indonesia*. *International Journal of Multidisciplinary Research and Development* . Volume 5 Issue 10. Oktober.
- Asrinaldi. 2012. *Politik Masyarakat Miskin Kota*. Yogyakarta: Gava Media.
- Bakti, Andi Faisal dkk. 2012. *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta: Churia Press

- Jonasmer Simatupang dan Muhammad Subekhan, “Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Indonesia”, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4 no. 3, (2018).
- Sahril Buchori dan Nurfitriany Fakhri. 2018. Nilai-Nilai Kedamaian Dalam Perspektif Suku Bugis dan Makassar. *Journal of Multicultural Studies in Guidance and Counseling* , Volume.2 Nomor 1
- Yunus, Rabina dan Sukri Tamma, 2014. Importance of Cultural Legitimacy to the Local Government in Indonesian Democracy. *Journal BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*. Vol. 21, Issue 1. Hal. 27-34.